

**PEMBAGIAN WARIS DUDA ATAU JANDA PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

(Studi Kasus di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI



Oleh:

AHSANA MATSWAYA NUR AZIZAH

101200011

Pembimbing:

Dr. MOH. MUKHLAS, M.Pd.

NIP. 196701152005011003

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Azizah, Ahsana Matswaya Nur. *Pembagian Waris Duda Atau Janda Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

Kata Kunci/Keyword: *Waris, Duda Janda, Hukum Islam*

Pembagian waris untuk duda atau janda di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama dengan asas keadilan berdasarkan keyakinan masyarakat. Pembagian waris untuk duda atau janda di Desa Sooko memiliki ukuran yang berbeda untuk setiap keluarga tergantung bagaimana kesepakatan ketika pembagian. Duda atau janda mendapatkan bagian namun tidak sesuai dengan bagian yang sudah ditetapkan dalam hukum kewarisan Islam. Pada saat pembagian waris terjadi perbedaan pada praktik dan teori berdasarkan hukum kewarisan Islam yang tertuang dalam al-Qur'an dan hukum Islam lain seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Duda seharusnya mendapatkan bagian setengah harta waris apabila pewaris tidak memiliki anak dan seperempat jika pewaris memiliki anak. Sedangkan untuk janda yang seharusnya mendapatkan seperempat bagian harta waris jika pewaris tidak memiliki anak dan juga seperdelapan jika pewaris memiliki anak. Akan tetapi beberapa duda dan janda tersebut tidak mendapatkan bagian yang semestinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana praktik pembagian waris untuk duda atau janda di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo perspektif hukum islam? (2) bagaimana implikasi hukum terhadap pembagian waris duda atau janda di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo perspektif hukum islam?

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah teknik wawancara (*interview*). Untuk teknik analisis data menggunakan analisis model Miles dan Hubberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian waris untuk duda atau janda masuk ke dalam kategori *ma'slahah mulghah* sebab bertentangan dengan ketentuan bagian yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 12. Implikasi hukum dari sistem pembagian waris untuk duda dan janda di Desa Sooko berseberangan dengan hukum Islam sehingga tidak sah. Adapun untuk praktiknya, sistem kewarisan Islam di Desa Sooko berubah menjadi hibah, *tanazul*, serta adanya penundaan bagian harta waris karena ada ahli waris yang belum cakap untuk mengurus harta warisan bagiannya.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahsana Matswaya Nur Azizah
NIM : 101200011
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PEMBAGIAN WARIS DUDA ATAU JANDA
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH* (Studi Kasus di Desa
Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Ponorogo, 14 Maret 2024
Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
NIP. 196701152005011003

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahsana Matswaya Nur Azizah
NIM : 101200011
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PEMBAGIAN WARIS DUDA ATAU JANDA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa
Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)**

Skripsi ini dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 3 April 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Lukman Santoso, M. H.
2. Penguji I : Umarwan Sutopo, Lc.,M.H.I
3. Penguji II : Dr. Moh. Mukhlas,M.Pd.

()
()
()

Ponorogo, 30 Mei 2024

Pengesahkan
Dekan Fakultas Syariah




Khusniati Rofiah, M. S. I
NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

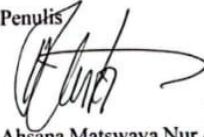
Nama : Ahsana Matswaya Nur Azizah
NIM : 101200011
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : PEMBAGIAN WARIS UTUK DUDA ATAU JANDA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa
Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya utuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 6 Juni 2024

Penulis



Ahsana Matswaya Nur Azizah

101200011

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahsana Matswaya Nur Azizah
NIM : 101200011
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **PEMBAGIAN WARIS UTUK DUDA ATAU JANDA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa
Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 6 Juni 2024

Penulis,



Ahsana Matswaya Nur Azizah
101200011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam merupakan sebuah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹ Namun dalam praktiknya ada diskursus terkait hukum kewarisan ini yang menarik untuk dikaji dalam hubungannya dengan kondisi sosio kultur masyarakat di Indonesia. Di Indonesia saat ini paling tidak ada tiga jenis hukum kewarisan yang masih berlaku dan aktif di tengah-tengah masyarakat Ketiga hukum tersebut yaitu hukum kewarisan berdasarkan syariat Islam sebagaimana yang tertuang dalam ilmu *faraid*, hukum kewarisan adat yang bersifat tidak tertulis, serta hukum kewarisan yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW). Di antara jenis hukum kewarisan tersebut yang banyak dipakai di tengah masyarakat dalam pelaksanaan pembagian waris adalah hukum Islam dan hukum adat. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam dengan beragam suku yang menjadi penyebab pelaksanaan pembagian warisan juga akan beragam sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka ikuti.

¹ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia", *Al-Mashlahah*, 1 (Mei 2020), 70.

Dalam hukum Islam telah dijelaskan pihak-pihak yang berhak untuk menerima bagian harta waris dengan detail. Diantara orang yang berhak menjadi ahli waris adalah anak, suami atau istri dari orang yang meninggal tersebut yang kemudian bisa disebut janda atau duda. Bagian janda atau duda dalam pembagian harta waris ini telah dijelaskan di dalam QS. An-Nisa' ayat 12 berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وِلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وِلْدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وِلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وِلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...” (QS. An-Nisa’; 12).²

Sejalan dengan ayat tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 179 dan 180 juga menjelaskan terkait dengan bagian waris duda atau janda dengan jelas. Pasal 179 yang menjelaskan bahwa duda berhak mendapat setengah bagian harta waris apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Apabila pewaris memiliki anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian. Sementara itu, Pasal 180 KHI menetapkan bahwa janda berhak memperoleh seperempat bagian harta waris bila pewaris tidak memiliki

² Al-Qur’an,4:12.

anak atau keturunan. Dan apabila pewaris memiliki anak maka janda berhak memperoleh seperdelapan bagian harta waris.

Jika hukum kewarisan Islam diterapkan dengan sungguh-sungguh maka sudah jelas bahwa baik istri atau suami mendapatkan bagian pasti. Yaitu suami atau duda dari si pewaris mendapatkan bagian setengah harta waris yang sudah dipotong hutang dan wasiat ketika tidak memiliki keturunan atau anak dan seperempat bagian ketika pewaris mempunyai anak. Sedangkan istri memperoleh bagian seperempat ketika pewaris tidak mempunyai anak dan seperdelapan ketika pewaris memiliki anak.

Pada praktiknya, pembagian waris di Desa Sooko sedikit yang menggunakan ketentuan syariat Islam. Praktik pembagian waris di Desa Sooko lebih umum dilakukan dengan mengikuti hukum adat. Tentu jika demikian, orang Islam yang berdomisili di Desa Sooko rata-rata melakukan praktik pembagian harta peninggalan atau harta waris yang tidak sesuai dengan hukum Islam termasuk di dalamnya adalah bagian waris yang telah diterangkan di dalam kitab suci al-Quran.³ Praktik pembagian harta waris yang bertentangan dengan al-Quran tentunya termasuk dalam perkara yang menyimpang dari hukum Allah, sedangkan hukum Allah sebenarnya mengandung maslahat untuk semua makhluk. Beberapa praktik pembagian harta waris yang bertentangan dengan hukum Islam salah satunya dalam penerapan pembagian waris untuk bagian istri atau suami atau bisa disebut janda atau duda dari si pewaris. Jika dalam

³ SMJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo: 16 Januari 2024.

hukum Islam dijelaskan bagian suami atau duda adalah setengah atau seperempat tergantung ada atau tidaknya anak dari pewaris maka dalam praktiknya si suami tidak mendapatkan bagian yang sesuai. Demikian juga hal ini terjadi pada istri dimana yang seharusnya mendapatkan bagian seperempat ketika pewaris tidak ada anak dan seperdelapan ketika pewaris ada anak justru tidak mendapatkan bagian yang sesuai. Praktik pembagian waris yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum kewarisan Islam ini juga cukup dianggap biasa oleh warga Desa Sooko.⁴

Bagian waris duda atau janda di wilayah Desa Sooko tidak sesuai dengan ketentuan syariat khususnya hukum kewarisan Islam. Ada duda atau janda yang mendapatkan bagian harta waris tetapi tidak sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan dan bahkan ada duda atau janda yang tidak memperoleh bagian waris sama sekali. Alasan yang mendasari praktik pembagian waris tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam ini juga beragam, ada yang karena alasan supaya meminimalisir terjadinya kemungkinan perselisihan waris antar saudara di masa yang akan datang, karena duda atau janda tidak sanggup mengurus harta waris, dan alasan lainnya.

Seiring dengan adanya fenomena tersebut, maka bisa dilihat masyarakat Desa Sooko ditemukan adanya *mafsadah*. Yaitu tidak mengikuti pembagian waris yang sudah dijelaskan dalam hukum Islam termasuk al-Qur'an. Oleh karena itu perlu kiranya untuk diteliti terkait

⁴ SMJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

dengan praktik pembagian waris untuk duda atau janda di Desa Sooko ini dengan tinjauan *maṣlahah* dan hukum islam tentang keabsahan alasan pembagian waris tersebut.

Fenomena praktik pembagian waris yang dilakukan oleh orang Islam namun tidak sesuai dengan hukum kewarisan dengan beragam alasan menjadi alasan peneliti untuk meneliti lebih jauh bagaimana pelaksanaan pembagian waris di Desa Sooko jika ditinjau dengan hukum islam dalam skripsi yang berjudul **“PEMBAGIAN WARIS DUDA ATAU JANDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (Studi Kasus di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo).**

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah penelitian ini bisa dirumuskan sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimana praktik pembagian waris duda atau janda di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dalam perspektif hukum islam dan *maṣlahah*?
2. Bagaimana implikasi hukum pembagian waris duda atau janda di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo menurut perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian waris duda atau janda di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dalam perspektif hukum islam dan *maṣlahah*.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum pembagian waris untuk duda atau janda di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dalam perspektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan terlaksananya penelitian ini, maka peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Tentunya dengan fokus pada hukum keluarga Islam, khususnya pada perkara hukum waris dan *maṣlahah* penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam pengembangan pengetahuan di bidang mawaris.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan untuk penelitian kedepannya yang akan datang.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini tidak akan mengulang materi secara mutlak. Maka peneliti telah menemukan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, diantaranya:

Pertama, skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Warisan Isteri di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes” karya Ary Kuswanto. Dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini membahas mengenai praktik pembagian waris Islam yang menyimpang dengan hukum kewarisan Islam. Dimana seorang istri yang ditinggal mati suami seharusnya mendapatkan seperempat bagian harta waris jika tidak ada anak dan seperdelapan jika memiliki anak. Tetapi dalam kenyataannya istri bisa memperoleh bagian waris yang sama dengan ahli waris lainnya bahkan istri bisa mendapatkan bagian yang lebih besar. Salah satu alasan yang mendasari praktik pembagian waris yang tidak sesuai dengan hukum Islam ini adalah karena ekonomi sang istri rendah dibandingkan ahli waris lainnya. Pembagian waris di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes ini lebih identik dengan hukum adat atau *urf*.⁵

Yang menjadi pembeda antara penelitian Ary Kuswanto dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yang paling utama terletak pada lokasi penelitian. Selain itu teori penelitian pada penelitian Ary dan penelitian ini juga ada perbedaan.

Kedua, skripsi berjudul “Tinjauan *Maṣlahah* Terhadap Pembagian Waris “Thtithik Idhing” di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan” karya Badruddin. Karya tulis ini merupakan penelitian kualitatif dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap

⁵ Ary Kuswanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Waris Istri Di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), 66.

proses pembagian waris “thithik idhing” studi kasus di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dan bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap dampak hukum pembagian waris adat “thithik idhing” studi kasus di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan. Tradisi pembagian waris di lokasi penelitian tersebut memiliki alasan untuk menghadirkan rasa keadilan untuk semua pihak yang berhak menerima harta warisan. Untuk hasil penelitian adalah tradisi pembagian waris “thithik idhing” ini masuk dalam kategori kemaslahatan pada masyarakat tersebut tetapi jika dilihat dengan hukum Islam perkara tersebut tidak merupakan sebuah kemaslahatan karena bertentangan dengan nash al-Qur’an.⁶

Jika dibandingkan penelitian Badruddin dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, persamaan terletak pada kesamaan pembahasan mengenai sistem pembagian waris di suatu wilayah dan ditinjau dengan *maṣlahah*. Meski demikian penelitian tetap mengandung perbedaan dimana penelitian Badruddin berlokasi di Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berlokasi di Desa Sooko Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Selain itu, penelitian yang akan peneliti lakukan juga lebih berfokus pada praktik pembagian waris terhadap duda atau janda.

Ketiga, jurnal penelitian berjudul “Pembagian Waris Bagi Janda Menurut Hukum Islam” karya Ita Surraya. Penelitian ini menggali

⁶ Badruddin, Tinjauan Masalah Terhadap Pembagian Waris Adat “Thithik Idhing” (Studi Kasus Di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan), *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2022), 75.

mengenai bagian janda dalam waris Islam, dimana penelitian tersebut menjelaskan bahwa syariat Islam telah mengatur adanya rasa keadilan dalam setiap aspek termasuk pembagian waris ini. Janda juga merupakan orang yang berhak mendapatkan harta warisan yang kedudukannya tidak bisa dihalangi oleh orang atau pihak ahli waris lainnya. Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan janda sebagai ahli waris menurut Hukum Islam dan jumlah harta yang berhak diterima janda dari harta warisan menurut hukum kewarisan Islam. Hasil penelitian Ita adalah bahwa menurut Hukum Islam janda akan memperoleh bagian seperempat bagian harta waris apabila pewaris tidak memiliki keturunan dan satu perdelapan jika pewaris mempunyai keturunan.⁷

Perbedaan antara penelitian Ita Surraya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek penelitian. Selain itu jenis penelitian Ita Surraya merupakan penelitian pustaka sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian lapangan.

Keempat, skripsi Dhiyan Cahyaningrum berjudul “Sistem Pembagian Waris Untuk Janda Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga). Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif ini menghasilkan penelitian bahwa pembagian harta warisan yang bisa diterima istri atau janda yang merupakan ahli waris untuk suaminya sebagai pewaris di Desa Brobot Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga mendapatkan

⁷ Ita Surraya, “Pembagian Waris Bagi Janda Menurut Hukum Islam,” *Risalah Kenotariatan*, 2 (Desember, 2020), 158.

bagian harta waris dengan cara musyawarah dan kesepakatan para ahli waris. Menurut fikih mawaris pembagian dengan sistem tersebut boleh dipraktikkan dengan adanya kesepakatan bersama ahli waris lainnya. Atau bisa dikatakan bahwa tidak ada unsur kemudharatan bagi ahli waris selain janda tersebut karena cara yang digunakan juga telah menjadi hukum adat atau *'urf* pada masyarakat sekitar. Selain itu, pembagian waris di Desa Brobot tersebut juga sudah sesuai dengan konsep bagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁸

Objek penelitian dan lokasi penelitian ini berbeda dengan yang akan peneliti teliti. Selain itu teori yang digunakan untuk melihat sistem pembagian waris janda juga berbeda dimana penelitian Dhiyan Cahyaningrum lebih menegaskan sistem pembagian dikaji dengan KHI.

Kelima, skripsi berjudul “Kedudukan Janda Tanpa Anak Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Bawaan Suami Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor: 0073/Pdt.G/2012/PA.SS)” karya Raja Findo Apalus. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang meneliti tentang putusan hakim atas sengketa waris yang mana tergugat yakni janda dari pewaris digugat untuk tidak diperbolehkan mendapat bagian waris dari saudara pewaris dengan alasan janda tersebut tidak melayani pewaris dengan baik semasa hidupnya. Namun kendati demikian hakim tetap memutuskan bahwa janda mendapatkan bagian seperempat harta waris dari suaminya karena tidak memiliki keturunan. Hasil dari penelitian

⁸ Dhiyan Cahyaningrum, Sistem Pembagian Waris Untuk Janda Perspektif Kompilasi Hukum Islam, *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), 80.

ini adalah janda memang tetap berhak mendapatkan bagian waris dan tidak ada seseorang yang dapat menghalanginya menjadi ahli waris sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan pasal 180 KHI.⁹ Yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada lokasi penelitian serta objek penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang memanfaatkan seluruh informasi yang didapatkan dari sasaran penelitian yang selanjutnya dapat disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data wawancara.¹⁰ Dengan demikian peneliti terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data terkait dengan sistem pembagian waris untuk duda atau janda di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu merupakan prosedur penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci.¹¹

⁹ Raja Findo Apalas, Kedudukan Janda Tanpa Anak Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Bawaan Suami yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor: 0073/Pdt.G/2012/PA.SS), *Skripsi* (Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2023), 3.

¹⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin:Antasari Press, 2021), 15.

¹¹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), 19.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Menurut Lincoln dan Guba menjelaskan bahwa studi kasus adalah penelitian yang mendalam dan mendetail tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan subjek penelitian. Peneliti menggali suatu fenomena dalam suatu waktu dan mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan berbagai prosedur pengumpulan data. Penelitian studi kasus juga mengeksplorasi masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi.¹²

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai *instrument* utama. Dengan demikian peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Instrumen lain selain peneliti dapat dilakukan tetapi fungsinya hanya sebagai pendukung data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.¹³ Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mendengarkan dengan cermat informasi yang digali, serta menganalisis dan menyimpulkan informasi. Dengan demikian peneliti secara langsung melakukan wawancara kepada para pihak yang terlibat dalam pembagian waris khususnya pembagian waris duda atau janda di Desa Sooko yang berfungsi sebagai informan

¹² Ibid.,32-33.

¹³ Hardani, Helmina Andriani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2020), 273.

yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Adapun pertimbangan peneliti mengambil lokasi tersebut karena adanya masalah dalam pembagian waris dimana konsep pembagian waris Islam di Desa Sooko tidak sesuai dengan konsep pembagian waris menurut hukum Islam baik menurut hukum Islam yang tertuang dalam al-Quran maupun hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam sehingga menarik untuk dikaji dengan tinjauan hukum islam dan *maṣlahah*.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti baik yang berupa fakta maupun angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.¹⁴ Dalam penelitian ini untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok, peneliti berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan sistem pembagian waris di Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo khususnya mengenai praktik pembagian waris dan alasan pembagian waris untuk duda atau janda di Desa Sooko.

¹⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi*, 70.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan oleh peneliti, yaitu:

1) Sumber data primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer berkaitan dengan sistem pembagian waris di Desa Sooko. Adapun sumber data primer dari data ini adalah orang yang bersangkutan dalam pembagian waris untuk duda atau janda di Desa Sooko. Sumber data primer ini terdiri dari lima orang duda dan enam orang janda selaku ahli waris dan pihak yang terkait dengan praktik pembagian waris.

2) Sumber data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber skunder yakni dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data skunder dalam penelitian ini berkaitan dengan teori pembagian waris Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara dan juga dokumentasi.

a. Teknik wawancara

Teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data sangat relevan untuk menggali informasi atau data pada fenomena

empiris yang diteliti. Wawancara memberikan kesempatan pada peneliti untuk mendapatkan pemahaman mengenai pandangan, pengalaman, serta perspektif narasumber terkait dengan praktik pembagian waris Islam khususnya untuk duda dan janda di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo yang tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam..¹⁵ Dengan menggunakan teknik ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada 11 duda dan janda serta pihak yang berkaitan dengan pembagian waris di Desa Sooko. Hasil dari wawancara ini kemudian bisa dijadikan sebagai data yang kemudian dianalisis dengan teori yang digunakan yaitu *maṣlaḥah*.

b. Teknik Dokumentasi

Penulis mencari data mengenai teori yang akan digunakan dalam menganalisis penelitian ini melalui sumber-sumber yang relevan. Teknik dokumentasi ini diambil melalui buku-buku serta jurnal yang sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian yakni teori hukum kewarisan islam dan teori *maṣlaḥah*.

6. Analisis Data

Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif setidaknya ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.

a. Reduksi data

¹⁵ Ibid., 59.

Reduksi data bisa diartikan sebagai sebuah langkah untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Semakin sering melakukan penelitian, maka yang diperoleh semakin banyak sehingga perlu untuk dilakukan pencatatan sehingga perlu untuk segera dilakukan analisis data melalui reduksi data ini. Dengan melakukan reduksi data maka data yang diperoleh akan semakin jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dalam mereduksi data ini peneliti fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai dan tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah sebuah temuan.¹⁶ Sehingga dalam tahap ini penulis akan lebih berfokus pada data yang menyangkut masalah pembagian waris yang terjadi di Desa Sooko.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap yang pening dalam analisis data kualitatif. Setelah data selesai direduksi, penyajian data dilakukan untuk menyampaikan temuan penelitian kepada pembaca maupun kepada pihak yang terkait. Pada penelitian kualitatif umumnya dilakukan dengan uraian singkat ataupun teks naratif dengan tujuan memungkinkan pembaca untuk memahami konteks dan temuan peneliti.¹⁷ Pada penelitian ini adalah penyajian data secara cermat dan sistematis mengenai sistem atau cara serta

¹⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 92.

¹⁷ *Ibid.*, 93.

alasan pembagian waris yang terjadi di Desa Sooko khususnya untuk bagian duda dan janda.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini juga menjadi jawaban dari rumusan masalah yang sudah disediakan di awal.¹⁸

7. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data pada penelitian kualitatif diantaranya dengan menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif terdiri dari:

a. Perpanjangan pengamatan

Pada tahap awal penelitian, peneliti dianggap menjadi orang asing dengan demikian informasi yang diberikan belum lengkap. Dengan adanya perpanjangan pengamatan ini, hubungan peneliti dengan narasumber semakin terbentuk dan akrab serta terbuka.

b. Meningkatkan ketekunan

Peneliti bisa meningkatkan ketekunan dalam pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak dengan cara melakukan pengamatan secara terus menerus, membaca buku ataupun hasil penelitian atau dokumentasi terkait.

¹⁸ Ibid., 94.

c. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber ini untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas data dalam penelitian. Untuk menguji kredibilitas data, peneliti melakukan triangulasi dengan cara memverifikasi dan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda. Data yang sudah berhasil dianalisis oleh peneliti selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber yang bersangkutan.

G. Sistematik Pembahasan

Dalam penelitian ini dituangkan dalam beberapa bab seperti di bawah ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan penelitian ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Uraian telaah pustaka untuk melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumnya yang digunakan sebagai pembedaan dengan kajian peneliti lainnya. Kerangka teoritik yang berguna untuk landasan dalam mengkaji tentang hukum waris Islam. Metode penelitian juga disebutkan dalam bab ini dengan tujuan agar menghasilkan hasil penelitian yang akurat. Bagian terakhir dalam bab ini adalah sistematika pembahasan untuk melihat korelasi dan literasi keseluruhan bab yang akan menjadi acuan dalam penyusunan bab-bab selanjutnya.

BAB II : HUKUM WARIS ISLAM DAN *MAŞLAĦAH*

Menjelaskan gambaran umum sebagai landasan teori dalam mengkaji konsep pembagian waris Islam berdasarkan tinjauan *maşlahah* yang meliputi pengertian *maşlahah* , dasar hukum *maşlahah*, jenis-jenis *maşlahah* serta pengertian waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, sebab-sebab kewarisan, penghalang kewarisan, asas-asas kewarisan, dan bagian waris duda.

BAB III: PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI DESA SOOKO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

Membahas tentang praktik pelaksanaan waris Islam di Desa Sooko secara umum dan khususnya praktik pembagian waris Islam untuk duda dan janda. Bab ini merupakan penyajian dari hasil pengamatan peneliti meliputi keadaan umum Desa Sooko dan gambaran khusus tentang pembagian waris Islam di Desa Sooko khususnya untuk bagian waris janda atau duda.

BAB IV : ANALISIS PEMBAGIAN WARIS DUDA ATAU JANDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN *MAŞLAĦAH*

Membahas tentang pembagian waris Islam untuk duda atau janda di Desa Sooko dalam perspektif *maşlahah* yang berguna untuk menganalisa data berdasarkan teori pada BAB II yang meliputi praktik pembagian waris dalam perspektif hukum islam dan *maşlahah* serta implikasi hukum pembagian waris

untuk duda dan janda di Desa Sooko dalam perspektif hukum Islam dan *maṣlahah*.

BAB V : PENUTUP

Merupakan puncak dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan sebagai jawaban dari pokok pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang berguna untuk merekomendasikan kajian lainnya.

BAB II

HUKUM WARIS ISLAM DAN *MAŞLAĦAH*

A. Teori Kewarisan

1. Pengertian waris

Secara etimologis, *mawaris* yang merupakan bentuk jamak dari kata *miras* yang artinya peninggalan. Mawaris juga bisa didefinisikan sebagai beralihnya sesuatu dari individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain entah berupa harta, ilmu, kemuliaan dan sebagainya. Kata mawaris ini juga merupakan sinonim dari *faraid* yang berasal dari kata *faridah* yang artinya bagian-bagian yang sudah ditentukan kemudian dikenal dengan faraid yakni pengetahuan tentang pembagian harta waris. Muhammad Ali al-Shabuni mengartikan warisan sebagai proses pemindahan kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal dunia (mayit) kepada ahli waris yang masih hidup. Proses ini mencakup harta bergerak, harta tidak bergerak, dan hak-hak yang sesuai dengan prinsip-prinsip syarat. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian.¹

Selain itu, dalam Pasal 171 huruf a KHI juga dijelaskan mengenai pengertian hukum kewarisan. Menurut pasal ini hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak

4. ¹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islami* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016),

3. Rukun dan Syarat Waris

Adapun terdapat tiga rukun pembagian waris, yaitu sebagai berikut:

- a. Pewaris, yaitu orang yang mewariskan harta peninggalannya. Syaratnya adalah telah dinyatakan meninggal dunia secara hakiki, hukmi ataupun berdasarkan perkiraan.
- b. Ahli waris, yaitu orang yang memiliki hubungan kekerabatan berdasarkan hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dan berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh al-muwaris.
- c. Al-maurus, yaitu harta peninggalan pewaris yang sudah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.³

4. Sebab-Sebab Kewarisan

Sebab-sebab mendapatkan waris menurut hukum waris Islam adalah sebagai berikut:

a. Pernikahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah tali untuk lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam

³ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mashlahah*, 1 (Mei 2020), 75.

hal orang yang berhak menjadi ahli waris sebab pernikahan adalah suami atau istri.

b. Nasab

Nasab adalah kerabat atau orang terdekat yang memiliki hubungan keturunan atau hubungan darah dengan pewaris. dengan pewaris. Adapaun hubungan nasab ini digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu:

- 1) Kelompok furu' (cabang), yaitu anak keturunan pewaris. Yang tergolong ke dalam kelompok furu' adalah anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dan keturunan seterusnya ke bawah.
- 2) Kelompok ushul (asal), yaitu leluhur yang menyebabkan adanya si pewaris yaitu bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya ke atas.
- 3) Kelompok hawasyi (menyamping), adalah kerabat yang memiliki hubungan kekerabatan menyamping dengan pewaris seperti saudara, saudaranya ayah, dan anak laki-laki dari mereka.

c. Wala'

Wala' adalah hubungan yang disebabkan karena pembebasan budak sehingga orang yang membebaskan budak

berhak menerima waris dari mantan budak yang telah dia bebaskan. Tetapi untuk saat ini wala' sudah tidak ada.⁴

5. Penghalang Kewarisan

Selain penyebab mendapat waris, seseorang juga bisa berpotensi tidak mendapatkan bagian waris sebab melakukan hal-hal yang menjadi penghalang kewarisan berikut.

a. Berbeda Agama Atau Murtad

Menurut hukum syara' seorang muslim tidak boleh waris mewarisi kepada orang yang beda agama. Adapun Pasal 172 KHI mengatur mengenai status agama seorang ahli waris yang dapat ditetapkan dengan beberapa ketentuan yaitu seperti kartu identitas, pengakuan, amalan, ataupun kesaksian. Jika seseorang tidak dapat menyatakan agamanya secara langsung, kartu identitas atau saksi lain dapat digunakan untuk menentukan status agama seseorang dalam konteks hukum waris. Sedangkan untuk bayi yang baru lahir ataupun anak yang belum dewasa, menurut Pasal 172 KHI menentukan agama mereka dengan mengikuti agama ayahnya atau lingkungan sekitarnya.

b. Pembunuhan

Pembunuhan yakni menghilangkan nyawa seseorang baik sendiri ataupun secara massal dengan alat yang bisa mematikan.

Ahli waris yang melakukan pembunuhan kepada pewaris atau

⁴ Johan Sullivan, "Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam," *Lex Privatium*, 3 (Maret 2019), 90.

memfitnah yang menyebabkan pewaris meninggal maka ia tidak mendapatkan waris. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw “Tidak berhak bagi si pembunuh sesuatu dari harta warisan” hadis riwayat an-Nasai.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam Pasal 173 menyatakan bahwa seseorang dapat dihalangi menjadi ahli waris apabila telah dihukum oleh hakim dengan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dua situasi yang disebutkan dalam pasal tersebut yang bisa menjadi dasar penghalangan adalah: a. seseorang dihukum karena melakukan pembunuhan, percobaan pembunuhan, atau melakukan penganiayaan berat terhadap pewaris; b. seseorang dihukum karena secara fitnah mengajukan pengaduan palsu bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat. Ketentuan ini mengandung kemaslahatan agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapat harta warisan dengan membunuh orang yang mewariskan.⁵

c. Status Budak

Pemahaman bahwa perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi bukan semata-mata karena status kemanusiaan, melainkan karena status formal sebagai budak. Dalam konteks

⁵ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 36.

hukum waris, status budak dianggap bisa mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menerima waris. Mayoritas ulama menyepakati bahwa seorang budak terhalang untuk menerima harta waris karena dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.⁶

6. Golongan Ahli Waris

Dalam fikih mawaris golongan ahli waris dibagi kedalam tiga bagian yakni *dhawil furud*, *'asabah*, dan *dhawi arham*, yaitu:

- a. *Dhawil furud*, yaitu golongan ahli waris yang sudah memiliki bagian yang pasti dan sudah ditentukan. Dalam Islam, bagian waris ini juga diterangkan dalam Al-Quran. Bagian pasti yang dimaksud adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$.
- b. *'Asabah*, ahli waris *'ashabah* adalah ahli waris yang tidak disebutkan bagiannya secara pasti di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dan masih memiliki kekerabatan yang kuat dengan pewaris karena berasal dari pihak laki-laki. Ahli waris *'ashabah* berhak atas keseluruhan harta waris secara keseluruhan ataupun sisa dari bagian ahli waris *dhawil furud*.
- c. *Dhawi arham*, ahli waris *dhawi arham* secara umum adalah orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan

⁶ Ibid., 37.

pewaris namun tidak termasuk dalam golongan *dhawil furud* dan *'ashabah*.⁷

7. Asas-Asas Kewarisan

Ada beberapa asas hukum yang melandasi kewarisan Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Asas Ijbari

Asas ijbari adalah dalam kewarisan maksudnya adalah terjadi secara otomatis atas kehendak Allah bukan disebabkan oleh kehendak pewaris ataupun ahli waris. Besaran bagian masing-masing ahli waris juga sudah ditetapkan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits. Adanya asas ijbari dalam hukum kewarisan ini bisa dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan juga dari segi kepada siapa harta tersebut beralih.

Asas ijbari dari segi peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya dapat dijelaskan bahwa seseorang baik laki-laki maupun perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu, ayah, maupun keluarga dekatnya yang lain. Asas ijbari dari segi jumlah berarti bagian atau hak ahli waris telah ditentukan oleh Allah sehingga ahli waris tidak perlu memikirkan jumlah bagian ahli warisnya baik mengurangi maupun menambah jumlah harta waris yang diterima oleh masing-masing ahli waris.

⁷ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 139.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kerabat laki-laki maupun perempuan. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa kewarisan bisa terjadi antara anak dengan orangtua dan juga antara dua orang yang bersaudara bila pewaris tidak memiliki anak ataupun orangtua.

c. Asas Individual

Asas individual bermakna bahwa harta waris dapat dibagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya, seluruh harta waris dinyatakan dalam suatu nilai dan kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerima harta warisan tersebut secara individu atau perorangan sesuai dengan kadar bagian masing-masing.⁸

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini bermakna bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh serta kewajiban yang ditanggung oleh ahli waris. Antara harta waris yang diperoleh oleh ahli waris laki-laki dan perempuan harus sebanding dengan kewajiban yang dipikul oleh masing-masing. Selain itu kewarisan Islam juga lebih mendahulukan ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris yaitu

⁸ Ibid.,36.

anak-anak pewaris yang dianggap lebih dekat dan berhak memperoleh harta waris.

e. Asas Kematian

Maksud dari asas ini adalah kewarisan baru bisa dilakukan apabila ada seseorang yang memiliki harta telah meninggal dunia. Artinya kewarisan bisa terjadi jika sudah didahului dengan kematian seseorang. Walaupun dalam hukum adat ada beberapa yang membagi waris dalam keadaan pewaris belum meninggal dunia namun Islam menyatakan bahwa kewarisan bisa dilakukan apabila sang pewaris telah meninggal dunia.⁹

8. Bagian Waris Duda Atau Janda

Secara spesifik bagian duda atau janda dalam pembagian waris

Islam telah dijelaskan di dalam QS. An-Nisa' ayat 12 berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْلَادُهُنَّ ۖ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تَوْصُونَ
بِهَا أَوْلَادَهُنَّ ۖ ...

“Dan bagianmu (suami-suami) setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu memiliki anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang

⁹ Ibid., 37.

kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.” (QS. An-Nisa’; 12).

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 179 dan 180 juga menjelaskan terkait dengan bagian waris duda atau janda dengan jelas. Pasal 179 yang menyatakan bahwa “Seorang duda berhak memperoleh setengah bagian, apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian dari harta waris”. Sedangkan Pasal 180 KHI menjelaskan bahwa “Janda berhak memperoleh seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”.

B. Teori *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Maṣlahah dari segi bahasa memiliki arti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi manfaat atau guna. *Maṣlahah* berasal dari kata *shalaha* yang berarti baik atau positif. Kata al- *maṣlahah* jamaknya *maṣalih* berarti baik, yang bermanfaat dan merupakan lawan dari keburukan dan kerusakan. Kata ini bisa digunakan untuk menunjukkan orang, benda maupun keadaan yang dipandang baik.

Secara istilah *maṣlahah* menurut Imam al-Ghazali didefinisikan sebagai menjaga atau memelihara tujuan syara’, adapun yang dimaksud dengan tujuan syara’ yang berhubungan dengan makhluk ada lima yaitu pemeliharaan atas diri mereka, agama, jiwa, akal, keturunan serta harta mereka. Maka setiap sesuatu yang mengandung

atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *maṣlaḥah*, dan semua hal yang menafikan lima pokok dasar tersebut maka disebut sebagai *mafsadah*, serta jika menolak mafsadah disebut sebagai *maṣlaḥah*.

Yusuf Hamid al-‘Alim mendefinisikan *maṣlaḥah* dengan dua arti yaitu arti majazi dan haqiqi. Makna majazi yang dimaksud Yusuf adalah suatu perbuatan yang di dalamnya ada kebaikan yang memiliki arti manfaat. Sedangkan Ahmad ar-Raisuni menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* adalah mendatangkan manfaat atau menghindari kemudharatan.¹⁰

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa yang disebut sebagai *maṣlaḥah* adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat serta kedamaian bagi manusia terhadap jasmani, akal, serta rohani dengan tujuan menjaga tujuan syariat.

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

Dasar hukum *maṣlaḥah* adalah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Anbiya’ ayat 107

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mengutus Rasulullah dengan salah satu tujuannya menyampaikan hukum Islam yang

¹⁰ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 86.

memberikan kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya baik untuk kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Jika secara umum syariat mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia, maka dalam seluruh aturan-aturan syariat sesungguhnya terkandung kemaslahatan di dalamnya.

3. Jenis-Jenis *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah dibagi menjadi beberapa bagian dilihat dari beberapa segi atau aspeknya, yaitu:

a. Dari segi keberadaannya, *maṣlaḥah* dibagi ke dalam tiga jenis yaitu *maṣlaḥah mu'tabarah*, *maṣlaḥah mulghah*, *maṣlaḥah mursalah*.

1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Jenis *maṣlaḥah mu'tabarah* ini dapat dipahami sebagai *maṣlaḥah* yang memang sudah diungkapkan dengan jelas di dalam Al-Qur'an sebagai *maṣlaḥah* untuk semua orang dan secara nyata *maṣlaḥah* tersebut bisa dirasakan oleh semua orang yang memiliki hajat atau perkara yang terkait. Bisa juga dikatakan bahwa *maṣlaḥah mu'tabarah* ini adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara'. Artinya sudah ada dalil khusus yang menjadi dasar kemaslahatan tersebut.¹¹

Contoh dari *maṣlaḥah mu'tabarah* ini adalah larangan meminum khamr atau minuman keras dalam al-Qur'an meskipun juga dijelaskan bahwa ada manfaat

¹¹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), 138.

mengkonsumsinya tetapi manfaat yang diterima lebih kecil dibandingkan mudharat yang diterima. Oleh sebab itu larangan meminum khamr merupakan *maṣlaḥah mu'tabarah* untuk manusia.

2) *Maṣlaḥah Mulghah*

Maṣlaḥah mulghah ini dipahami sebagai *maṣlaḥah* yang bisa diterima oleh akal manusia sebagai sebuah *maṣlaḥah* tetapi bertentangan dengan ketentuan syara'.

Contoh *maṣlaḥah mulghah* ini diberikan oleh Satria Efendi yaitu adanya anggapan masyarakat bahwa menyamakan bagian waris secara rata untuk anak laki-laki dan perempuan adalah sebuah *maṣlaḥah*. Akan tetapi secara jelas bahwa hal tersebut bertentangan dengan syara' yakni ketentuan pembagian waris Islam untuk anak yang sudah dijelaskan dalam QS. an-Nisa' ayat 11 yang menyatakan bahwa bagian waris anak laki-laki dua kali lebih banyak dibandingkan bagian anak perempuan. Pertentangan ini menunjukkan bahwa apa yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal bukanlah *maṣlaḥah* dalam pandangan Allah.¹²

3) *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah merupakan keadaan dimana akal manusia memandang bahwa sesuatu termasuk sebuah *maṣlaḥah*

¹² Ibid.,139.

dan tidak ada ketentuan dalam nash yang mengatur pembolehan maupun penolakannya. Bahkan *maṣlaḥah mursalah* juga bisa dipahami sebagai *maṣlaḥah* yang sesuai dengan syariat. *maṣlaḥah mursalah* bisa ditemui dalam persoalan muamalah yang menuntut terciptanya suatu kemaslahatan berdasarkan situasi dan kondisi sosial masyarakat.¹³

- b. Dari segi kepentingan atau tingkatannya, *maṣlaḥah* dibagi kedalam tiga macam yaitu *maṣlaḥah darūriyyah*, *maṣlaḥah hajiyah*, *maṣlaḥah tahsiniyah*.

1) *Maṣlaḥah Darūriyyah*

Menurut Wahbah al-Zuhaili *maṣlaḥah darūriyyah* adalah apa yang menjadi sandaran kehidupan manusia dalam perkara agama dan dunia. Tatkala kemaslahatan ini hilang maka kehidupan di dunia menjadi rusak dan kerusakan meluas, kenikmatan abadi akan lenyap serta hukuman di akhirat ditimpakan. Dan ini merupakan kemaslahatan yang paling kuat, tidak ada sesuatu lainnya yang melampauinya, oleh karena itu perkara yang tersier dan skunder tidak boleh diutamakan jika merusak perkara premier (*darūri*).

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa *maṣlaḥah darūriyyah* ini sangat penting dan utama, bahkan kehidupan

¹³ Ibid.,140.

manusia bertumpu pada *maṣlaḥah darūriyyah* ini. *Maṣlaḥah darūriyyah* juga harus ada untuk tegaknya kehidupan masyarakat yang apabila tidak terlaksana maka akan terjadi kerusakan dalam kehidupan manusia.¹⁴

Maṣlaḥah darūriyyah ini menurut al-Ghazālī ada lima yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan serta memelihara harta. Lima kemaslahatan ini juga disebut sebagai *al-Darūriyyah al-Khamsah* yang berarti lima prinsip dasar hukum Islam biasa juga disebut dengan tujuan utama syari'at Islam atau *maqāṣid sharī'ah*.

2) *Maṣlaḥah Hajiyah*

Maṣlaḥah hajiyah adalah kemaslahatan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maṣlaḥah hajiyah* sebagai *maṣlaḥah* yang dibutuhkan oleh manusia untuk kemudahan dan menolak kesulitan pada manusia. *Maṣlaḥah hajiyah* apabila tidak terlaksana maka tidak menghadirkan bahaya pada kehidupan manusia. Sedangkan Imam al-Syatibi memberikan penjelasan tentang *maṣlaḥah hajiyah* sebagai kebutuhan dalam rangka keluasan dan menghilangkan kesempitan yang pada umumnya

¹⁴ Agus Miswanto, *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*, (Magelang: UNIMMA PRESS, 2019), 166.

dapat mengakibatkan kepada kesulitan dan kesusahan yang tidak berujung pada hilangnya objek yang dicari.¹⁵

Maṣlaḥah hajiyah juga bisa disebut dengan kebutuhan skunder dimana bila tidak tercapai maka tidak mengancam keselamatan manusia.

3) *Maṣlaḥah Tahsiniyah*

Maṣlaḥah tahsiniyah adalah yang sifatnya sebagai pelengkap. Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dimaksud dengan *maṣlaḥah tahsiniyah* adalah *maṣlaḥah* yang apabila hilang maka aturan kehidupan tidak akan sirna sebagaimana *maṣlaḥah darūriyyah* dan tidak pula berimplikasi kesulitan bagi manusia sebagaimana *maṣlaḥah hajiyah*. Tetapi kehidupan manusia menjadi buruk berdasarkan ukuran orang-orang yang mempunyai akal.¹⁶ Dengan demikian bisa dikatakan bahwa *maṣlaḥah tahsiniyah* ini merupakan tingkat kebutuhan tersier yang apabila tidak terpenuhi maka tidak mengancam eksistensi *maqāṣid shari'ah* dan juga tidak menimbulkan kesulitan.

c. Dari segi kandungan *maṣlaḥah* dibagi menjadi dua, yaitu *maṣlaḥah 'ammah* dan *maṣlaḥah khāṣah*.

1) *Maṣlaḥah 'ammah*

¹⁵ Ibid., 168.

¹⁶ Ibid., 169.

Maṣlaḥah ‘ammah adalah kemaslahatan umum untuk yang menyangkut kepentingan orang banyak atau mayoritas orang.

2) *Maṣlaḥah Khāṣah*

Maṣlaḥah khāṣah adalah kemaslahatan pribadi, adapun jenis *Maṣlaḥah* ini jarang ditemui.

d. Dari segi berubah atau tidaknya, *maṣlaḥah* dibagi menjadi dua bentuk yakni *maṣlaḥah dābitāh* dan *maṣlaḥah mutaghāyarah*.

1) *Maṣlaḥah Dābitāh*

Maṣlaḥah dābitāh adalah kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak berubah. Contoh dari kemashalatan ini adalah kewajiban shalat, puasa, zakat, dan juga haji.

2) *Maṣlaḥah Mutaghāyarah*

Maṣlaḥah mutaghāyarah adalah kemaslahatan yang mengalami perubahan sesuai dengan tempat, waktu dan juga subjek hukum. Kemaslahatan jenis ini biasanya berkaitan dengan bidang muamalah.¹⁷

¹⁷ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, 93-96.

BAB III

PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI DESA SOOKO KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Sesuai dengan tema penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan terkait dengan sistem pembagian waris di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Sebelum penulis menjelaskan terkait sistem pembagian waris untuk duda dan janda di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, penulis akan terlebih dahulu menyajikan profil singkat Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, dimana lokasi tersebut merupakan lokasi yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian.

1. Letak Geografis Desa Sooko

Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu desa yang terletak di sebelah timur wilayah Kabupaten Ponorogo. Adapun letak geografis Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo adalah $7^{\circ}53$ LS $111^{\circ}38$ BT dengan ketinggian kurang lebih 450m s/d 600m di atas permukaan air laut. Adapun Desa Sooko berbatasan langsung dengan Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo di sebelah utara dan timur, Desa Bedoho Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo di sebelah selatan serta Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo di

sebelah barat. Desa Sooko memiliki luas wilayah kurang lebih 383,251 Ha yang terbagi ke dalam empat wilayah dukuh, yaitu Dukuh Dalangan, Dukuh Sombro, Dukuh Sombro, Dukuh Sooko, dan Dukuh Blimbing.¹

2. Kondisi Penduduk Desa Sooko

Untuk mengetahui kondisi penduduk Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo secara umum maka dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	1933
2.	Perempuan	1982

3. Kondisi Keagamaan Desa Sooko

Kondisi keagamaan Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo tidak hanya didominasi oleh satu agama saja melainkan terdiri dari beberapa agama. Diantara agama yang dianut oleh penduduk Desa Sooko adalah Islam, Kristen serta Katolik. Kendati demikian, Desa Sooko tetap didominasi oleh masyarakat yang beragama Islam. Kegiatan keagamaan di Desa Sooko tetap berjalan dengan damai dan aman meskipun tidak hanya terdapat satu agama saja. Adapun daftar kondisi keagamaan penduduk Desa Sooko

¹ <https://kantordesasooko.blogspot.com/2012/05/desa-sooko-kecamatan-sooko-kabupaten.html> , (diakses pada 13 Januari 2024, jam 09.00 WIB).

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3901
2.	Kristen	7
3.	Katolik	7

4. Kondisi Pendidikan Desa Sooko

Kondisi pendidikan Desa Sooko tentunya juga perlu untuk diketahui sebagai salah faktor yang berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat terkait dengan ilmu pembagian waris khususnya dalam hal pembagian waris Islam. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan sebagaimana berikut:²

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum tamat SD	107
2.	SD	1.295
3.	SMP/Sederajat	848
4.	SMA/Sederajat	656
5.	Diploma I/II	5

² <https://kantordesasooko.blogspot.com/2012/05/desa-sooko-kecamatan-sooko-kabupaten.html> , (diakses pada 13 Januari 2024, jam 09.10 WIB).

6.	Diploma III	18
7.	S1/Diploma IV	196
8.	S2	3
9.	S3	1

5. Daftar Duda dan Janda di Desa Sooko

Penelitian ini mengutamakan pada sistem pembagian waris untuk duda dan janda di Desa Sooko sehingga berikut adalah lampiran daftar jumlah duda dan janda yang terdapat di Desa Sooko:

Tabel 3.4 Jumlah Duda dan Janda

NO	Status	Cerai Hidup	Cerai Mati
1.	Duda	42	48
2.	Janda	44	244

B. Sistem Pembagian Waris Untuk Duda Atau Janda di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Sistem pembagian waris di untuk duda atau janda di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo menggunakan kewarisan adat. Pembagian waris untuk duda atau janda dengan pembagian sesuai dengan kekeluargaan dan pertimbangan hal-hal lainnya masih menghiasi sistem pembagian waris di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Berikut akan dipaparkan hasil wawancara penelitian tentang praktik

pembagian waris untuk duda dan janda di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo serta alasan yang mendasari praktik tersebut.

1. Alasan Praktik Pembagian Waris Untuk Duda Atau Janda di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Sistem pembagian waris di Desa Sooko cukup beragam dan tidak berpegang sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Bagian yang didapatkan oleh setiap duda dan janda juga beragam tergantung kesepakatan yang terjadi ketika pembagian harta waris. Praktikanya, pembagian waris di Desa Sooko dilakukan dengan cara musyawarah antara seluruh ahli waris. Selain itu, keputusan juga bisa dilakukan dengan keputusan dari pewaris semasa masih hidup ataupun keputusan dari duda dan janda dari pewaris. Pembagian waris di Desa Sooko juga dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Selain itu, pembagian waris di Desa Sooko juga didasarkan pada asas keadilan oleh pihak yang bersangkutan sehingga menyebabkan bagian setiap duda dan janda menjadi beragam.

“Bagian waris untuk duda dan janda di Desa Sooko ini sangat beragam mbak, tergantung kesepakatan masing-masing keluarga. Biasanya memang ditentukan oleh hasil musyawarah yang diikuti oleh seluruh ahli waris ataupun berdasarkan keputusan dari pewaris semasa hidupnya. Selain itu, duda dan janda juga berhak menentukan bagian masing-masing ahli waris termasuk bagiannya sendiri. Memang cukup beragam untuk bagian waris setiap duda dan janda.”³

Berdasarkan data yang penulis di lapangan, ada beberapa duda atau janda yang tidak mendapatkan bagian sama sekali, ada yang

³ SR, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Januari 2024.

mendapatkan bagian lebih kecil dari ketentuan hukum kewarisan Islam dan ada yang mendapatkan bagian lebih besar dari yang ditentukan oleh hukum kewarisan Islam. Ada beragam alasan yang mendasari adanya pembagian waris yang tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam ini di Desa Sooko. Beberapa alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Karena duda atau janda selaku ahli waris tidak sanggup mengurus harta waris bagiannya karena faktor kesehatan dan usia serta untuk menghindari adanya perselisihan antar ahli waris

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait. Bapak T menjelaskan alasan mengapa ia tidak mendapatkan harta waris sama sekali dari harta peninggalan istrinya.

“Kulo sampun sepuh, pun mboten kuat ngurus ladang. Kersane anak-anak mawon. Lintune ngoten langsung kulo bagi kersane umpami sewayah-wayah kulo ditimbali engkang Moho Kuoso pun mboten khawatir enten cekcok antara anak-anak kulo.”⁴ (Saya sudah tua, sudah tidak kuat mengurus ladang. Biarkan anak-anak saja. Selain itu saya bagi seluruhnya biar kalau sewaktu-waktu saya dipanggil yang Maha Kuasa sudah tidak khawatir ada perselisihan antara anak-anak saya.)

Selaras dengan keterangan bapak T tersebut, ibu SN juga memiliki alasan yang sama yakni ketidakmampuan mengurus harta peninggalan suaminya yang cukup luas sebab faktor usia dan kesehatan. Selain itu menghindari adanya perselisihan antara anak-anaknya juga menjadi alasan yang mendasari janda tersebut

⁴ T, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

mendapatkan bagian yang lebih kecil dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Selain itu beberapa narasumber juga memberikan alasan yang hampir sama dengan bapak T dan ibu SN.

“Bagian warisan kulo sampun kulo paringne anak-anak, amargi kulo sampun sepuh mbak. Kulo nggeh khawatir menawi mboten kulo bagi sedoyo malah mengke enten cekcok anak-anak niku.”⁵ (Bagian waris saya sudah saya bagikan kepada anak-anak saya seluruhnya mbak. Saya juga khawatir kalau tidak saya bagi nantinya ada perselisihan antara anak-anak itu).

Bapak ST yang merupakan salah satu duda yang menerima bagian kurang dari semestinya menjelaskan bahwa alasan yang menjadi penyebab kesepakatan tersebut lantaran bapak ST mengalami gangguan kesehatan sehingga tidak bisa mengurus seluruh bagian waris yang berhak diterimanya dari pewaris.

“Saya itu ada sedikit masalah kesehatan mbak, jadi kalau disuruh mengurus harta warisan istri saya juga tidak sanggup karena saya juga mengurus lahan pribadi saya. Saya hanya mengambil sedikit bagian dari lahan istri saya, dari total yang ditinggalkan almarhum itu sekitar 4000 m² saya ambil 500 m² saya gunakan untuk kandang ternak.”⁶

- b. Karena ahli waris lain belum cakap dalam mengurus harta warisan
- Duda atau janda di Desa Sooko biasanya menjadi ahli waris langsung bersama dengan anak-anak pewaris. Namun dalam kasus anak selaku ahli waris yang belum bisa mengurus harta warisan maka secara otomatis duda atau janda mengurus harta waris

⁵ SN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Januari 2024.

⁶ ST, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Februari 2024.

bagian sang anak. Beberapa duda dan janda memberikan keterangan terkait dengan alasan pembagian waris sebagai berikut. Alasan tersebut diungkapkan oleh bapak A dan bapak SW ketika melakukan wawancara.

“Alasan kenapa seluruh harta bagian masih menjadi milik saya karena anak saya masih kecil mbak, masih duduk di bangku Sekolah Dasar jadi tidak mungkin untuk mengurus harta warisan dari istri saya.”⁷

Tidak berbeda jauh dengan alasan bapak A, bapak SW juga menurutkan alasan mengapa ia tidak membagi warisan dengan anak dari pewaris yakni karena anak dari pewaris masih sekolah sehingga dianggap belum bisa mengurus harta peninggalan pewaris.

“Karena anak saya masih sekolah dan harta peninggalan istri saya adalah sawah jadi ya masih saya sendiri yang ngurus mbak.”⁸

Ibu Y turut memberikan alasan mengapa dalam pembagian waris dalam keluarganya ia mengurus seluruh harta waris dari suaminya. Alasan yang mendasari adalah karena sang anak dirasa belum mampu untuk mengurus harta peninggalan pewaris sebab masih sekolah.

“Ya kalau alasannya sudah jelas karena anak saya masih kecil masih sekolah jadi belum bisa mengurus harta warisan dari bapaknya. Kedua anak saya belum bisa mengurus, nanti malah saya takutnya ladangnya jadi terbengkalai.”⁹

⁷ A, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Februari 2024.

⁸ SW, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Februari 2024.

⁹ Y, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

2. Besaran Bagian Waris Untuk Duda dan Janda di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Adapun untuk besaran bagian yang diterima oleh ahli waris khususnya duda atau janda di Desa Sooko juga cukup beragam dan tidak sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh hukum kewarisan Islam. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 12 telah jelas disebutkan bagian waris untuk duda atau janda dengan pasti. Namun pada praktiknya besaran tersebut tidak dilaksanakan oleh para duda atau janda selaku ahli waris. Beberapa macam bagian duda atau janda di Desa Sooko Kecamatan Sooko adalah sebagai berikut:

- a. Bagian waris untuk duda atau janda lebih kecil dari ketentuan hukum kewarisan Islam

Hal ini diungkapkan oleh beberapa narasumber dalam proses penggalan data. Duda atau janda bisa mendapatkan bagian yang lebih kecil dari yang semestinya dengan beragam alasan yang mendasarinya.

Ibu SN merupakan seorang janda yang mendapatkan bagian waris namun lebih kecil jika dilihat dari bagian yang sudah tertera dalam hukum kewarisan Islam.

“Kulo mendet bagian sekedik niku amargi kersane adil, kulo nggeh pun sepuh pun mboten saget ngurus ladang kaleh sawab terlalu ombo. Dadi kulo namung angsal harta waris griyo kaleh pekarangan kira-kira 350 m². Tanah peninggalan suami kulo sekitar 11.500 m² niko sempat diitung anak-anak

*sakderenge dibagi.*¹⁰ (Saya mengambil bagian sedikit karena biar adil, saya juga sudah tua sudah tidak bisa mengurus ladang dan sawah yang terlalu luas. Jadi saya hanya mendapat bagian harta waris rumah dan pekarangan kira-kira 350 m². Tanah peninggalan suami saya totalnya sekitar 11.500 m² dulu sempat dihitung anak-anak sebelum dibagi.)

Selain ibu SN, bapak ST dan juga bapak S juga mendapatkan bagian kurang dari ketentuan hukum kewarisan yang ada.

“Saya mendapatkan bagian kurang dari seperempat mbak. Sedangkan ahli waris selain saya itu ada anak-anak saya. Dua anak laki-laki dan satu anak perempuan.”¹¹

Ucap bapak ST selaku seorang duda yang mendapatkan bagian kurang dari seperempat total harta warisan yang ditinggalkan istrinya.

- b. Bagian waris untuk duda atau janda lebih besar dari ketentuan hukum kewarisan Islam

Duda atau janda di Desa Sooko juga bisa memperoleh bagian yang lebih besar dari ketentuan hukum kewarisan Islam. Tentunya sama dengan besaran bagian lainnya, pembagian waris untuk duda atau janda lebih besar dari bagian semestinya ini juga memiliki alasan yang beragam. Namun alasan yang paling banyak ditemui adalah karena ahli waris selain duda atau janda belum mampu untuk mengurus harta warisan sendiri. Beberapa duda atau janda yang mendapatkan bagian lebih besar telah memberikan keterangan sebagai berikut dalam proses wawancara penggalan data.

¹⁰ SN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Januari 2024.

¹¹ ST, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

Bapak A dan bapak SW mendapatkan bagian warisan yang lebih banyak yakni seluruh harta peninggalan istrinya. Keterangan tersebut disampaikan oleh kedua narasumber saat proses wawancara.

“Harta peninggalan istri saya seluruhnya masih saya kelola mbak. Istri saya meninggalkan sawah yang dulu dibeli sebelum menikah sama saya. Cuma sepetak mungkin luasnya sekitar 500 m². Selain itu juga ada motor peninggalannya.”¹²

Sejalan dengan bapak A, bapak SW juga masih mendapatkan keseluruhan harta peninggalan istrinya.

“Istri saya meninggalkan sawah mbak, dulu dibeli saat masih belum menikah karena dulu kan bekerja di Hongkong. Sampai sekarang hak kepemilikan sawah tersebut masih milik saya sepenuhnya dengan luas sekitar 6.000 m². Semuanya masih milik saya dan saya pribadi yang mengelola.”¹³

Sedangkan untuk bagian janda juga tidak berbeda jauh dengan bagian waris untuk duda tersebut. Janda di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo beberapa juga mendapatkan bagian penuh harta warisan dari suaminya meski ada ahli waris lain. Demikian pula juga ada janda yang mendapatkan bagian lebih kecil dari yang seharusnya. Bagian waris untuk janda cukup beragam sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa narasumber berikut ini.

Ibu Y yang merupakan seorang janda mendapatkan bagian harta waris secara keseluruhan dari suaminya.

¹² A. Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Februari 2024.

¹³ SW, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Februari 2024.

“Untuk saat ini seluruh harta waris suami saya, saya kelola sendiri mbak. Anak-anak saya belum saya beri bagian dari harta waris suami saya. Karena suami saya meninggalkan harta warisan sawah dan hewan ternak jadi semuanya masih saya kelola.”¹⁴

Selanjutnya ibu R, seorang janda yang mendapatkan setengah harta waris peninggalan suaminya. Menurut penuturannya, ibu R mendapatkan setengah harta waris karena harta waris dari suaminya dibagi dua dengan seorang anak laki-laki pewaris.

“Saya mendapatkan bagian setengah harta waris mbak. Berdasarkan kesepakatan dengan anak saya karena dia sudah dewasa jadi dia saya libatkan dalam musyawarah kemarin. Sebenarnya kalau diberikan kepada anak saya seluruhnya saya juga tidak masalah mbak, tapi anak saya tidak mau. Harta peninggalan bapaknya itu ada sawah, ladang dan juga rumah itu semuanya saya bagi dua dengan anak saya.”¹⁵

c. Duda atau janda tidak memperoleh bagian waris sama sekali

Selain adanya duda atau janda yang mendapatkan bagian lebih besar dan lebih kecil dari yang semestinya juga terdapat beberapa duda atau janda yang tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Mayoritas duda atau janda yang tidak mendapatkan bagian ini adalah mereka yang memiliki usia lanjut. Alasan yang paling mendasarinya adalah ketidaksanggupan duda atau janda dalam mengurus harta warisan yang sebenarnya berhak untuk diterimanya. Salah satu duda yang tidak mendapatkan bagian sama sekali adalah bapak T. Berdasarkan hasil wawancara bapak T

¹⁴ Y, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

¹⁵ R, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Januari 2024.

menuturkan bahwa seluruh harta warisan dari istrinya dibagi kepada anak-anak pewaris.

“Kulo mboten angsal harta warisan ibune mbak. Ibune sedo niku tahun 2014 kira-kira harta warisane niku 5.000 m², riyen nggeh sangking wongtuane. Sedanten kebune niku kulo langsung paringne teng anak-anak kulo. Anak kulo kaleh jaler kaleh estri, pun lemahe niku sedoyo kulo paringne ken mbagi kaleh amrih adil.”¹⁶ (Saya tidak mendapat harta warisan dari istri saya mbak. Istri saya meninggal tahun 2014 kira-kira meninggalkan harta warisan seluas 5.000 m², dulu juga dari orangtuanya. Semua kebunnya langsung saya berikan kepada anak saya. Anak saya dua, laki-laki dan perempuan, semua tanahnya saya berikan untuk dibagi dua biar adil).

Ibu K selaku seorang janda juga tidak mendapatkan bagian waris sama sekali.

“Kulo sampun sepuh dadose warisan mbahe langsung kulo bagi damel yogo kulo. Warisane suami kulo niku sawah kaleh tegalan dados e mboten kiat menawi kulo ngurusi.”¹⁷ (saya sudah tua jadi warisan kakeknya langsung saya bagi untuk anak saya. Warisan suami saya itu ada sawah sama ladang jadi tidak kuat untuk mengurus.)

Selain kedua narasumber tersebut, ibu J juga menjelaskan bahwa dirinya tidak mendapatkan bagian waris. Meskipun tidak mendapatkan harta warisan sama sekali, dalam penjelasannya, ibu J mengatakan bahwa hal itu berdasarkan keputusan yang disepakati antara dirinya dan anak-anaknya.

“Saya sempat mengelola harta warisan bagian saya mbak, lalu kemudian semuanya saya bagikan kepada anak-anak saya. Sejak anak-anak saya mampu mengelola saya langsung berikan semua bagian saya juga. Karena saya

¹⁶ T, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Januari 2024.

¹⁷ K, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Januari 2024.

sudah tua jadi kurang maksimal ngurusnya, *eman-eman* kalau sampai terbengkalai.”¹⁸

Ibu JM kemudian juga memberikan informasi mengenai bagian waris yang ia dapatkan dari keseluruhan harta waris yang ditinggalkan suaminya. Janda tersebut mengungkapkan bahwa ia sama sekali tidak mendapatkan harta warisan. Tidak berberda jauh dengan narasumber sebelumnya, ibu JM juga menjelaskan bahwa ia tidak mengambil bagian waris lantaran sudah tua dan tidak sanggup mengurus harta waris bagiannya. Namun meski demikian, ibu JM sempat mengelola ladang yang merupakan bagian waris miliknya.

“Bagian waris kulo awale nggeh kulo rawat piyambak. Nanging niki tambah sepuh kulo ajak anak-anak rembukan malih, langsung kulo paringne anak-anak bagian kulo niku. Awale kulo bagian warisan tegalan mbak. Riyen nggeh kulo openi, kulo gunaaken damel tani.”¹⁹ (Bagian waris saya awalnya saya urus sendiri. Tetapi sekarang saya tambah tua jadi saya ajak anak-anak musyawarah lagi dan langsung saya berikan anak-anak bagian saya itu. Saya dulu juga dapat bagian waris berupa ladang. Dulu juga saya rawat, saya gunakan untuk bertani.

Bapak S juga tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Namun meski demikian, hasil pembagian tersebut telah berdasarkan hasil keputusan bersama dengan ahli waris lainnya.

“Bagian waris saya itu sawah sama rumah mbak, sekarang sudah saya bagikan untuk anak-anak. Rumah ini sekarang juga sudah atas nama anak saya. Saya sudah cukup *nrimo*

¹⁸ J, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Januari 2024.

¹⁹ JM, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Januari 2024.

dirawat anak-anak. Semakin tua semakin tidak kuat mengurus sawah sendirian.”²⁰

Jika disimpulkan maka duda dan janda di Desa Sooko ada yang mendapatkan bagian waris yang lebih kecil dari semestinya, mendapat bagian waris yang lebih besar dari semestinya, serta tidak mendapatkan bagian sama sekali.



²⁰ S, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Januari 2024.

BAB IV

PEMBAGIAN WARIS DUDA ATAU JANDA PERSPEKTIF HUKUM

ISLAM

A. Analisis Hukum Islam dan *Maṣlahah* Terhadap Praktik Pembagian Waris Duda Atau Janda di Desa Sooko Kabupaten Ponorogo

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur mengenai pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada kerabat atau keluarga yang masih hidup baik mengenai harta peninggalannya, bagian masing-masing ahli waris ataupun cara untuk membagi harta warisan tersebut.¹ Sejalan dengan pengertian tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.² Untuk hukum kewarisan Islam sudah banyak dijelaskan dalam sumber hukum yang ada termasuk al-Qur'an. Secara khusus al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 12 menjelaskan mengenai bagian janda atau duda dalam sistem pembagian waris Islam yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجِكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وِلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وِلْدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّيَنَّ بِهَا أَوْ دِينَ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا

¹ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019), 13.

² Anshary *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 63.

تَرِكْتُمْ اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَانْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلِهِنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ ...

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.” (QS. an-Nisa’; 12).³

Selain al-Qur’an surat an-Nisa’, pembagian waris Islam juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sejalan dengan al-Qur’an, KHI juga menjelaskan mengenai bagian pasti untuk duda atau janda sebagai ahli waris. Dalam KHI, bagian duda sebagai ahli waris apabila pewaris tidak memiliki anak adalah setengah harta peninggalan sedangkan jika pewaris memiliki anak maka mendapat bagian seperempat. Selanjutnya, janda mendapatkan bagian seperempat apabila pewaris tidak memiliki anak dan mendapat bagian seperdelapan apabila pewaris memiliki anak.

Para ulama ushul fiqh mendefinisikan *maṣlaḥah* dalam beragam perspektif, salah satunya adalah imam al-Ghazālī yang menjelaskan pengertian *maṣlaḥah* sebagai sesuatu yang membawa atau mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan dari kemadaratan yang pada hakikatnya adalah untuk memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.⁴

³ Al-Qur’an, 4: 12.

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011) 345-346.

Dengan demikian pada bagian ini akan dilihat bagaimana praktik pembagian waris untuk duda atau janda di Desa Sooko ini apabila dilihat dari perspektif hukum Islam dan juga *maṣlahah*. Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil penelitian pelaksanaan waris di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ini praktik pembagian waris untuk duda atau janda tidak sesuai dengan hukum kewarsan Islam. Duda yang seharusnya berhak untuk mendapatkan bagian setengah harta waris jika pewaris tidak memiliki anak dan seperempat bagian harta waris jika pewaris memiliki anak justru tidak mendapatkan bagian yang semestinya berdasarkan hukum kewarisan Islam. Demikian pula untuk janda di Desa Sooko juga banyak yang tidak mendapatkan bagian semestinya yakni seperempat jika pewaris meninggalkan anak dan juga seperdelapan bagian harta waris jika pewaris memiliki anak.

Pembagian waris yang tidak berpedoman pada hukum kewarisan Islam baik yang tercantum dalam al-Qur'an ataupun hukum Islam lain seperti Kompilasi Hukum Islam sudah dianggap wajar oleh masyarakat Desa Sooko. Sehingga banyak ahli waris yang tidak menerima harta warisan sesuai dengan bagiannya yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam yang ada. Meskipun pembagian waris di Desa Sooko tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam namun pembagian tersebut sudah dianggap maslahat oleh masyarakat desa Sooko.

Dengan berbagai alasan yang ada, sistem pembagian waris untuk duda atau janda di Desa Sooko ini tidak sesuai dengan ketentuan bagian

untuk ahli waris khususnya duda atau janda yang sudah tertera di dalam al-Qur'an. Pada realitanya pembagian waris untuk duda atau janda di Desa Sooko berjalan berdasarkan hasil musyawarah ataupun keputusan pihak tertentu. Khusus pembagian waris untuk duda atau janda di Desa Sooko ini cukup beragam untuk bagian masing-masing duda atau janda sebagai ahli waris.

Pembagian waris yang tidak sesuai dengan ketentuan bagian untuk duda atau janda berdasarkan hukum kewarisan Islam ada beberapa kasus di Desa Sooko. Yang pertama adalah bapak T yang merupakan ahli waris sebagai duda bersama satu anak laki-laki dan satu anak perempuannya. Berdasarkan keterangan bapak T, istrinya meninggal dunia dengan meninggalkan tanah seluas kurang lebih 5.000 m^2 , maka seharusnya berdasarkan hukum kewarisan Islam bapak T berhak memperoleh bagian tanah kurang lebih seluas 1.250 m^2 .

Ibu SN selaku janda yang menjadi ahli waris bersama dua anak laki-laki dan satu anak perempuannya hanya mendapat bagian kurang lebih 350 m^2 tanah. Total tanah peninggalan suaminya kurang lebih adalah 11.500 m^2 maka apabila mengikuti hukum kewarisan Islam ibu SN berhak mendapat seperdelapan bagian waris atau setara dengan $1.437,5 \text{ m}^2$.

Bapak A dan bapak SW mendapatkan keseluruhan harta peninggalan dari istrinya ketika mewaris bersama anaknya. Berdasarkan hukum kewarisan Islam bapak A dan bapak SW hanya berhak memperoleh seperempat bagian waris.

Ibu J dan ibu K juga tidak mendapatkan bagian waris sama sekali dari suaminya selaku pewaris. Ibu J dan ibu K berhak mendapatkan bagian seperdelapan bagian karena mewaris bersama anak dari pewaris. Namun kenyataannya berdasarkan keputusan bersama, kedua janda tersebut justru tidak mendapatkan bagian waris sama sekali.

Berbanding terbalik dengan ibu J dan ibu K, ibu R dan ibu Y memperoleh bagian yang lebih banyak dari seharusnya. Ibu Y mendapatkan bagian seluruh harta peninggalan suaminya sedangkan ibu R memperoleh setengah bagian waris. Tentunya jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan bagian yang ditetapkan oleh hukum kewarisan Islam yakni seperdelapan bagian sebab ibu Y dan ibu R mewaris bersama anak dari pewaris.

Jika dianalisis menggunakan hukum kewarisan Islam maka sistem pembagian waris yang berjalan di Desa Sooko bertentangan dengan hukum yang ada. Ketidaksesuaian antara bagian yang ditentukan oleh hukum kewarisan Islam dan praktik pembagian waris untuk duda dan janda di Desa Sooko ini berlawanan dengan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 12. Selain itu dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 13 dan 14 juga dijelaskan bahwa ketentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris tersebut merupakan ketentuan dan ketetapan dari Allah swt.

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ١٣ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده
يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ١٤

Artinya: Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai sedang mereka kekal didalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. (QS. an-Nisa'; 13-14).⁵

Ketentuan hukum yang digariskan oleh Allah untuk mengatur tata tertib kehidupan manusia bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan atau kemaslahatan untuk manusia di dunia dan di akhirat. Di antara ketentuan Allah tersebut ada yang mengandung sanksi dan ada yang menuntut untuk dipatuhi saja untuk mencapai suatu kemaslahatan. Oleh sebab itu hukum-hukum Allah ada yang bersifat mengatur dan memaksa. Ketentuan hukum yang bersifat mengatur merupakan anjuran yang kuat dari Allah untuk dipatuhi dalam rangka menciptakan keseimbangan dan keharmonisan pergaulan hidup di dunia serta untuk mencapai keselamatan hidup di akhirat. Karena itu terdapat suatu perbuatan hukum yang tidak ada alternatif lain yang menguntungkan semua pihak, maka pilihan terakhir kembali kepada ketentuan yang telah diatur oleh Allah swt. Sedangkan ketentuan hukum yang bersifat memaksa merupakan pilihan tunggal yang wajib dipatuhi dan barangsiapa yang melanggar akan mendapatkan sanksi dari Allah swt.⁶

⁵ Al-Quran, 4:13-14.

⁶ Anshary *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 64.

Pembagian waris khususnya untuk duda dan janda telah dengan gamblang disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 12 dan merupakan suatu hukum yang bersifat memaksa. Artinya, bahwa setiap ahli waris termasuk duda dan janda harus menyetujui bagian yang telah ditetapkan oleh Allah Swt tersebut tanpa harus mencari argumentasi pembenar untuk menafikan berlakunya ketentuan ayat tersebut. Dengan demikian bisa dilihat bahwa dalam ayat 13 dan 14 al-Qur'an surat an-Nisa' telah dengan tegas menjelaskan bahwa garis-garis hukum itu adalah ketentuan dari Allah dan barangsiapa yang tidak mematuhi akan mendapatkan sanksi dari Allah Swt.⁷

Dilihat dari perspektif *maṣlaḥah* dari segi keberadaannya, maka fenomena ketidaksesuaian pembagian waris untuk duda atau janda di Desa Sooko dengan ketentuan nash yaitu al-Qur'an maka termasuk dalam kategori *maṣlaḥah mulghah*, yakni *maṣlaḥah* yang bertentangan dengan nash.⁸ Karena bagian untuk duda atau janda dalam hal pembagian harta waris sudah tertera dengan jelas di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 12, maka pembagian waris yang tidak sesuai tentunya menjadi bertentangan dengan ayat tersebut. Para ulama sepakat bahwasanya *maṣlaḥah mulghah* tidak bisa dijadikan sebagai dasar ijtihad.

Dengan demikian, apabila para ahli waris sepakat untuk menyelesaikan pembagian harta waris dengan suatu kesepakatan yang berbeda dengan ketentuan ayat-ayat bagian waris tersebut, dengan suatu

⁷ Ibid., 65.

⁸ Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi* (Lhokseumawwe: Sefa Bumi Persada, 2021), 72.

ketentuan bahwa semua ahli waris telah benar-benar mengetahui akan porsi dan haknya masing-masing, maka sepanjang pembagian yang disepakati itu tidak merugikan ahli waris yang lain, pembagian yang semacam itu dibenarkan. Ketentuan mengenai hal tersebut juga didukung dengan adanya ketentuan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Tetapi apabila tidak ada kesepakatan yang terjadi maka ketentuan dalam surat an-Nisa’ ayat 12 tetap bersifar memaksa. Pembagian waris yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan ini menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin secara material cara pembagiannya mengalami penyimpangan dari ketentuan syara’. Akan tetapi secara formal hukum faraid telah dijalankan sehingga telah memenuhi ketentuan syara’.⁹

B. Implikasi Hukum Pembagian Waris Duda Atau Janda di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Analisis Hukum Islam

Pembagian waris untuk duda atau janda di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo berjalan tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam yang sudah dengan jelas diterangkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 12. Berdasarkan hukum kewarisan yang ada dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa duda berhak mendapatkan harta warisan sebesar setengah harta warisan jika pewaris tidak memiliki anak dan bagian seperempat jika pewaris memiliki anak. Sedangkan janda

⁹ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam*, 66.

mendapatkan bagian seperempat jika pewaris memiliki anak dan bagian seperdelapan jika pewaris memiliki anak. Pada realita yang hidup di tengah-tengah masyarakat Desa Sooko, pembagian waris berdasarkan hukum kewarisan Islam tidak berjalan dengan sempurna. Ada keluarga yang tidak menerapkan hukum kewarisan Islam tersebut dengan beragam alasan yang melatarbelakangi. Di antara beberapa alasan tersebut adalah adanya ahli waris yang tidak mampu mengurus harta warisan, duda atau janda yang sudah lanjut usia sehingga tidak mampu mengurus harta warisan, serta untuk menghindari adanya perselisihan antar ahli waris.

Praktik pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo tidak mengikuti hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur'an.¹⁰ Jika dianalisis menggunakan hukum Islam khususnya hukum kewarisan Islam hal tersebut tidak sah untuk dilakukan sebab ketentuan pembagian waris Islam telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hukum tersebut sebenarnya bersifat memaksa. Ketentuan hukum waris yang terdapat di dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176 merupakan hukum yang bersifat memaksa. Artinya, setiap ahli waris harus mematuhi dan menyetujui bagian waris yang telah ditetapkan Allah dalam ayat-ayat tersebut tanpa harus mencari argumentasi pembenar untuk menafikan berlakunya ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut juga dipertegas dengan adanya kalimat bahwa dalam ayat 11 al-Qur'an surat an-Nisa' yang berarti "ini adalah ketetapan Allah".

¹⁰ SMJ, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

Oleh sebab itu, barangsiapa yang tidak mematuhi ketentuan tersebut akan mendapat sanksi dari Allah.¹¹

Pembagian waris untuk duda dan janda di Desa Sooko tidak lagi murni sebagai praktik pembagian waris berdasarkan hukum Islam. Ada beberapa kasus yang berubah menjadi hibah, *tanazul*, serta ada penundaan pembagian waris oleh para ahli waris. Berikut ini implikasi hukum yang timbul dalam alasan praktik pembagian waris di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo berdasarkan analisis hukum Islam:

- a. Karena duda dan janda sudah tua dan tidak sanggup mengurus harta waris serta menghindari adanya perselisihan antar ahli waris

Beberapa duda dan janda membagi bagian waris yang menjadi haknya kepada ahli waris lain, yakni anak-anak dari pewaris. Alasan kesehatan dan umur yang sudah tua menjadi salah satu alasan mengapa duda dan janda tersebut tidak mengambil bagian harta warisnya. Selain itu, duda dan janda membagi harta warisan bagiannya kepada anak-anaknya dengan pewaris sebab khawatir jika suatu hari nanti terjadi perselisihan antara anak-anaknya selaku ahli waris. Hal tersebut sesuai dengan penuturan yang diberikan oleh bapak T selaku salah satu duda yang membagi harta warisan kepada ahli waris lain.

“Kulo sampun sepuh, pun mboten kuat ngurus ladang. Kersane anak-anak mawon. Lintune ngoten langsung kulo bagi kersane umpami sewayah-wayah kulo ditimbali engkang Moho Kuoso pun mboten khawatir enten cekcok antara anak-anak kulo.”¹²
(Saya sudah tua, sudah tidak kuat mengurus ladang. Biarkan

¹¹ Anshary *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 65.

¹² T, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

anak-anak saja. Selain itu saya bagi seluruhnya biar kalau sewaktu-waktu saya dipanggil yang Maha Kuasa sudah tidak khawatir ada perselisihan antara anak-anak saya.)

Dengan pernyataan tersebut maka bisa dilihat bahwa duda selaku pewaris sebenarnya sudah menyadari bahwa ia memiliki bagian warisan dari harta peninggalan istrinya. Namun karena alasan kesehatan, usia yang tidak memungkinkan untuk mengurus harta warisan, serta untuk menghindari adanya perselisihan di kemudian hari ia memberikan harta bagian warisnya kepada anak-anaknya. Adapun pemberian harta waris bagian bapak T kepada anak-anaknya boleh dan sah untuk dilakukan. Pemberian bagian harta waris bapak T kepada anak-anaknya merupakan hibah, yakni pemberian seseorang yang masih hidup kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dan bukan merupakan hadiah.¹³

Selain bapak T, alasan praktik pembagian waris yang sama juga terjadi kepada ibu SN yang memberikan sebagian harta waris bagiannya kepada anak-anaknya.

“Kulo mendet bagian sekedik niku amargi kersane adil, kulo nggeh pun sepuh pun mboten saget ngurus ladang kaleh sawab terlalu ombo. Dadi kulo namung angsal harta waris griyo kaleh pekarangan kira-kira 350 m². Tanah peninggalan suami kulo sekitar 11.500 m² niko sempat diitung anak-anak sakderenge dibagi.”¹⁴ (Saya mengambil bagian sedikit karena biar adil, saya juga sudah tua sudah tidak bisa mengurus ladang dan sawah yang terlalu luas. Jadi saya hanya mendapat bagian harta waris rumah dan pekarangan kira-kira 350 m².)

¹³ Halimatussa'diyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam Tentang Status Hibah Orang Tua Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan,” *Skripsi*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020), 40.

¹⁴ SN, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Januari 2024.

Tanah peninggalan suami saya totalnya sekitar 11.500 m² dulu sempat dihitung anak-anak sebelum dibagi.)

Berdasarkan keterangan ibu SN tersebut bisa disimpulkan bahwa sebenarnya ia mendapatkan bagian waris yang sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Namun karena ibu SN merasa tidak sanggup mengelola seluruh bagian warisnya maka ia membagi sebagian kepada anak-anaknya. Peristiwa pada praktik pembagian waris di keluarga ibu SN berarti menunjukkan bahwa ada *tanazul*, yang artinya ada ahli waris yang merelakan sebagian bagian warisnya kepada ahli waris yang lain. Jika harta warisan telah dibagi sesuai dengan aturan Islam maka ahli waris boleh memberikan bagiannya kepada ahli waris lain sesuai dengan fatwa yang menyebutkan bahwa jika sebagian ahli waris *tanazul* untuk ahli waris lainnya dan ia merupakan orang yang baligh dan berakal maka hukumnya boleh dan sah untuk dilakukan.¹⁵

Sehingga dengan demikian kasus yang serupa dengan bapak T dan ibu SN sah dilakukan sebab duda dan janda sudah mengetahui pembagian waris yang seharusnya ia dapatkan namun tidak mengambilnya dan menghibahkan atau *tanazul* kepada anak-anaknya. Proses pembagian waris yang dilakukan oleh duda dan janda ini juga melalui musyawarah yang melibatkan seluruh ahli waris. Dengan demikian prosesnya juga sudah sah menurut hukum Islam berdasarkan Pasal 183 KHI yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat

¹⁵ Abdul Syukur, “Analisis Kasus Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kota Tembilahan Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Riset Indragiri*, 3 (2022), 212.

melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”¹⁶

b. Karena ahli waris lain belum cakap dalam mengurus harta warisan

Proses pembagian waris untuk duda dan janda di Desa Sooko juga dipengaruhi oleh kecakapan ahli waris lain dalam mengurus harta waris bagian masing-masing. Duda dan janda yang mewaris bersama anak dari pewaris yang belum cakap mengurus harta warisan cenderung mendapatkan bagian yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa narasumber.

“Alasan kenapa seluruh harta bagian masih menjadi milik saya karena anak saya masih kecil mbak, masih duduk di bangku Sekolah Dasar jadi tidak mungkin untuk mengurus harta warisan dari istri saya.”¹⁷

Bapak A menjelaskan bahwa dirinya memperoleh bagian waris yang lebih besar dari ukuran yang dijeaskan dalam hukum kewarisan islam sebab anaknya belum cakap untuk mengurus harta warisan bagiannya. Akan tetapi, dalam penjelasan tersebut bapak A menjelaskan bahwa harta warisan peninggalan istrinya seluruhnya masih menjadi hak miliknya dan anak pewaris selaku ahli waris tidak mendapatkan bagian sama sekali. Tentunya praktik waris yang dilakukan oleh keluarga bapak A ini tidak sesuai dengan hukum islam. Sebab dalam hukum islam anak yang masih di bawah umur dan belum cakap mengurus harta warisan maka ia tetap berhak mendapatkannya

¹⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷ A, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 25 Februari 2024.

namun harus menggunakan sistem perwalian. Hal ini berdasarkan hukum islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 184 yang berbunyi “bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya di angkat wali berdasarkan keputusan hakim atas asal usul anggota keluarga.”¹⁸ Praktik pembagian waris yang dilakukan oleh bapak A tidak sesuai dengan hukum islam sebab ia tidak membagi harta warisan dengan anak pewaris yang merupakan ahli waris yang sah dan mengambil seluruh harta peninggalan pewaris. Di dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam juga telah dijelaskan dalam Pasal 174 mengenai kelompok ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan. Pada Pasal 174 ayat (1) KHI dijelaskan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan merupakan ahli waris yang sah berdasarkan hubungan darah.¹⁹ Sejalan dengan KHI, al-Qur’an juga sudah menjelaskan dalam surat an-Nisa’ ayat 11 mengenai anak laki-laki dan anak perempuan sebagai pewaris beserta besaran bagian yang seharusnya bisa didapatkan. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian satu orang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.²⁰

¹⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹ Ibid.,

²⁰ Al-Qur’an, 4:11.

Dengan demikian maka pembagian waris yang menyebabkan anak pewaris tidak mendapatkan bagian harta waris tidak sah untuk dilakukan sebab melanggar ketentuan hukum kewarisan Islam, termasuk ketentuan yang telah ada dalam al-Qur'an.

Berbeda dengan bapak A, ibu Y dan bapak SW memberikan bagian waris anak-anaknya. Akan tetapi karena anak-anak dari ibu Y dan bapak SW masih belum dewasa dan dianggap belum cakap mengurus harta warisan maka bagian waris anaknya dikelola oleh duda dan janda yang bersangkutan selaku orang tua dan wali dari anak. Oleh sebab itu di keluarga bapak SW dan ibu Y terjadi penundaan pembagian harta waris dimana anak sebab anak dianggap belum cakap mengurus harta warisan. Hal ini juga diungkapkan oleh ibu Y ketika proses wawancara.

“Ya kalau alasannya sudah jelas karena anak saya masih kecil masih sekolah jadi belum bisa mengurus harta warisan dari bapaknya. Kedua anak saya belum bisa mengurus, nanti malah saya takutnya ladangnya jadi terbengkalai. Kalau sudah dewasa dan sanggup mengelola nanti tetap dibagikan.”²¹

Pernyataan tersebut dapat menjelaskan bahwa beberapa keluarga di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ini beberapa menggunakan sistem penguasaan sementara harta warisan. Harta waris akan dibagi kepada seluruh ahli waris jika

²¹ Y, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 Januari 2024.

anak-anak selaku ahli waris sudah dewasa dan dianggap mampu untuk mengurus harta warisan bagiannya. Di Indonesia, pembagian waris dengan sistem tersebut cukup sering terjadi. Pembagian harta warisan ditunda hingga seluruh ahli waris mampu untuk mengurus harta warisan bagiannya. Penguasaan sementara tersebut bisa diberikan kepada wali dari ahli waris yang belum cakap tersebut.²² Tentunya hal ini sesuai dengan hukum islam yang tertuang dalam KHI mengenai perwalian untuk anak selaku ahli waris yang belum dewasa untuk menerima harta warisan yang menjadi haknya.



²² Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islami* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 195.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka sesuai dengan rumusan masalah dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan:

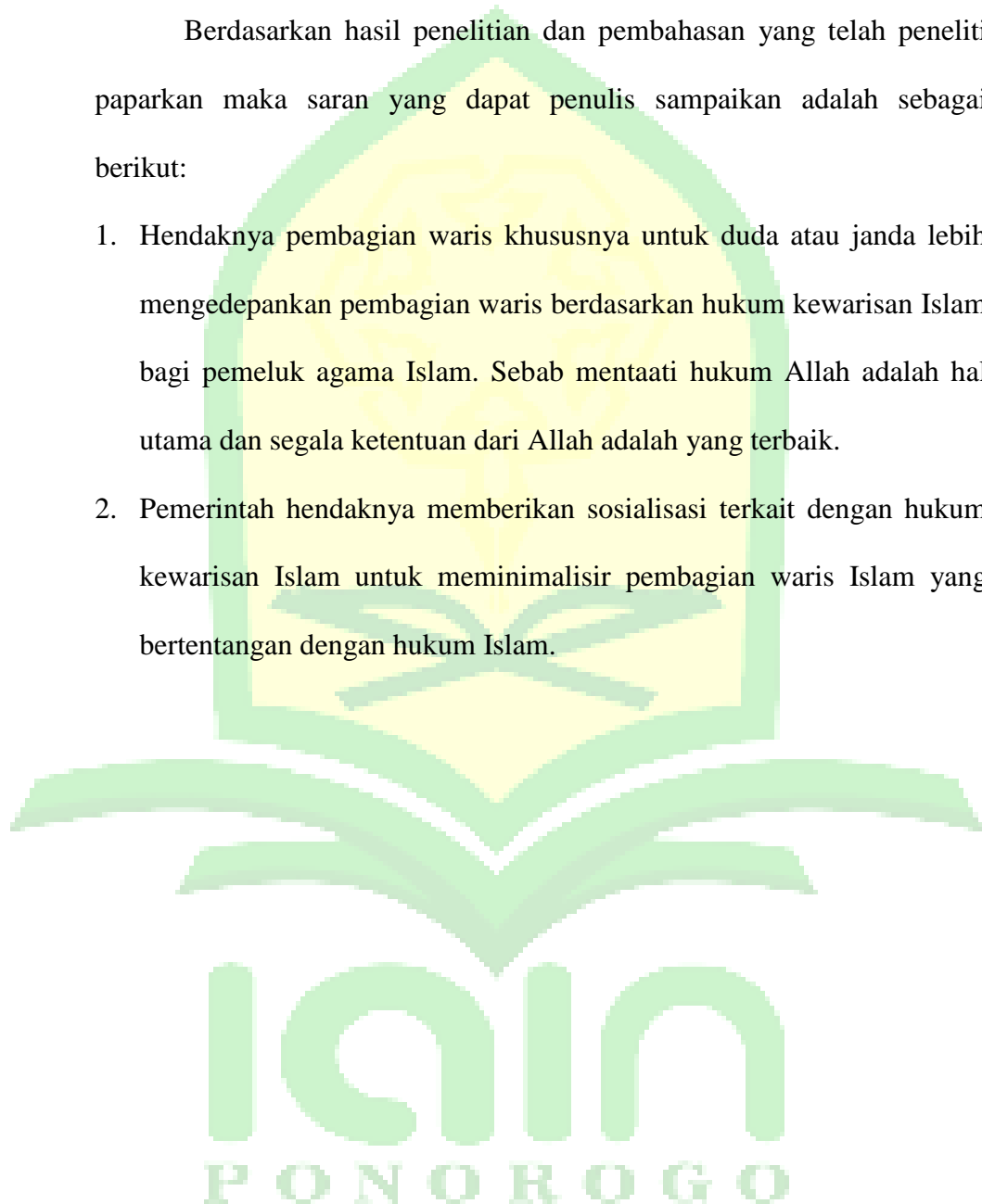
1. Pelaksanaan pembagian waris untuk duda atau janda telah ditetapkan bagiannya dalam al-Qur'an, sehingga apabila pelaksanaan pembagian waris untuk duda atau janda yang tidak sesuai dengan takaran bagian berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 12 jika dilihat dengan perspektif *maṣlaḥah* maka termasuk ke dalam jenis atau kategori *maṣlaḥah mulghah*. Dikategorikan dalam *maṣlaḥah mulghah* sebab *maṣlaḥah* tersebut terjadi bertentangan dengan hukum yang sudah ditentukan dengan pasti dalam nash.
2. Praktik pembagian waris duda dan janda di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo jika dianalisis berdasarkan hukum islam maka tidak sesuai dengan hukum kewarisan islam. Hal ini dikarenakan bagian waris untuk para ahli waris khususnya untuk duda dan janda tidak sesuai dengan takaran yang telah ditentukan oleh hukum kewarisan islam. Sedangkan alasan-alasan yang mendasari ketidaksesuaian bagian harta waris tersebut ada beragam. Dengan alasan-alasan yang ada, pembagian waris di Desa Sooko berubah menjadi hibah, tanazul, dan juga adanya penundaan pembagian harta

waris. Pembagian waris dengan cara tersebut boleh dilakukan asalkan syarat-syaratnya terpenuhi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pembagian waris khususnya untuk duda atau janda lebih mengedepankan pembagian waris berdasarkan hukum kewarisan Islam bagi pemeluk agama Islam. Sebab mentaati hukum Allah adalah hal utama dan segala ketentuan dari Allah adalah yang terbaik.
2. Pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi terkait dengan hukum kewarisan Islam untuk meminimalisir pembagian waris Islam yang bertentangan dengan hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2017.
- Apalas, Findo Raja, “Kedudukan Janda Tanpa Anak Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Bawaaan Suami yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor: 0073/Pdt.G/2012/PA.SS).” *Skripsi*, Universitas Sriwijaya, 2023.
- Assyafira, Gisca Nur. “Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia” *Jurnal Al-Maslahah*, Vol.8 Edisi 1. Surabaya: Universitas Airlangga, 2020: 68-84.
- Badruddin, Tinjauan Masalah Terhadap Pebagian Waris Adat “Thithik Idhing” (Studi Kasus di Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan).” *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2022.
- Basri, Rusdaya, *Ushul Fikih 1*. Parepare: Nusantara Press. 2019.
- Cahyaningrum, Dhiyan, “Sistem Pembagian Waris Untuk Janda Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” *Skripsi*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pusataka Ilmu, 2020.
- Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2019.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiiqih)*. Palembang: CV Amanah, 2019.
- Kuswanto, Ary, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagian Waris Istri di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.” *Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2019.
- Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat” *Jurnal*

- Ilmiah Kesehatan Masyarakat, Vol. 12 Edisi 3. Jambi: Univesitas Jambi, 2020: 147-150.
- Miswanto, Agus, *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Magelang: UNIMA PRESS. 2019.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Desertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islami*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2021.
- Ritonga, Raja. "Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 Edisi 1. Sumatera Utara: STAIN Mandailing Natal, 2020: 14-25.
- Safradi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Lhokseumawwe: Sefa Bumi Persada. 2021.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sullivan, Johan, "Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam," *Lex Privatum*, Vol. 3. 2019. 90.
- Surraya, Ita. "Pembagian Waris Bagi Janda Menurut Hukum Islam" *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol.1 Edisi 2. Mataram: Universitas Mataram, 2020: 143-157.
- Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats. 2017.

